

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI SERTIFIKASI HALAL, NIB, DAN PIRT DI DUSUN BANJARTENGAH, SUMBERSEKAR

Mutiara Sari Dewi*, Waafi Mafaza, Luluk Safira, Rika Amelia, Wahyu Nur Jadidah, Mahmudah

Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

*email Koresponden Penulis: mutiara.sari@unisma.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah. Pemerintah terus mendorong penguatan UMKM melalui berbagai kebijakan, termasuk sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), guna meningkatkan daya saing serta legalitas usaha. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini mengacu pada pendekatan Community Based Research (CBR), sementara teknik Rapid Rural Appraisal (RRA) digunakan untuk menggali informasi secara partisipatif dan cepat. Hasil program ini menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di wilayah tersebut, memungkinkan produk lokal seperti olahan singkong, bunga rosela, jeruk, dan stroberi untuk lebih mudah dipasarkan secara luas. Sertifikasi halal memastikan produk yang aman dikonsumsi oleh masyarakat Muslim, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas pangsa pasar. Sementara itu, NIB dan PIRT memberikan legalitas usaha serta mempermudah distribusi produk ke berbagai platform pemasaran. Program ini juga melibatkan mahasiswa UNISMA KSM-T kelompok 77, yang memperoleh pengalaman langsung dalam pemberdayaan ekonomi desa. Dengan adanya kebijakan ini, UMKM di Dusun Banjartengah memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Kata Kunci:

UMKM; sertifikasi halal; NIB; PIRT; ekonomi desa

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendukung pemerataan pendapatan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja yang luas. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih mengalami kendala dalam hal legalitas usaha, akses permodalan, serta perluasan pasar. Beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM antara lain kurangnya pemahaman terkait regulasi perizinan usaha, sulitnya memperoleh sertifikasi halal dan izin edar, serta keterbatasan dalam pemasaran produk ke skala yang lebih luas.

Legalitas usaha menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Tanpa legalitas yang jelas, produk UMKM sulit menembus pasar yang

lebih luas, baik nasional maupun internasional. Selain itu, konsumen cenderung lebih percaya terhadap produk yang telah memiliki sertifikasi resmi, seperti sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Pemerintah berperan penting dalam memberikan dukungan kepada UMKM melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan legalitas usaha. Seperti yang dikemukakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2023), legalitas usaha tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi jembatan penting bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan temuan BPS (2023) yang menunjukkan bahwa UMKM dengan legalitas usaha memiliki peluang 2,5 kali lebih besar untuk melakukan ekspor dibandingkan yang tidak memiliki legalitas.

Salah satu bentuk dukungan konkret yang dilakukan adalah melalui pemberian sertifikat halal, NIB, serta PIRT. Di Kabupaten Malang, pemerintah daerah bersama dengan mahasiswa Universitas Islam Malang (UNISMA) Kelompok KSM-T 77 menginisiasi kegiatan pemberdayaan UMKM di Dusun Banjartengah, Desa Sumbersekar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan legalitas usaha dan akses pasar bagi produk UMKM.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membantu UMKM dalam memperoleh legalitas usaha serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Dengan adanya sertifikat halal, NIB, dan PIRT, produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di Dusun Banjartengah memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Kajian pustaka terkait menunjukkan bahwa legalitas usaha dan sertifikasi halal dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM dalam jangka panjang (Fuadi et al., 2022). Selain itu, pengabdian lain juga menunjukkan bahwa pemberian sertifikasi usaha dapat meningkatkan daya saing, memperluas akses ke pasar formal, serta membuka peluang bagi UMKM untuk memperoleh bantuan dan pendanaan dari pemerintah maupun lembaga keuangan (Astuti et al., 2022).

Dengan adanya program ini, diharapkan UMKM di Dusun Banjartengah dapat berkembang lebih pesat dan memiliki daya saing tinggi. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendorong pertumbuhan UMKM berbasis komunitas dengan dukungan pemerintah daerah serta keterlibatan akademisi dalam program pemberdayaan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk mengembangkan pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Dusun Banjartengah, Sumbersekar, untuk metode pengabdian yang digunakan adalah dengan metode *Participatory Action Research (PAR)*, Metode ini melibatkan masyarakat dalam pengabdian sekaligus aksi nyata untuk memperbaiki kondisi sosial mereka.

Kegiatan kunjungan ini diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Sumbersekar yang menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan institusi pendidikan dalam mendorong kemajuan desa, khususnya dalam sektor ekonomi. Bupati Kabupaten Malang dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada masyarakat Dusun Banjartengah atas semangatnya dalam mengembangkan UMKM lokal. Beliau juga menekankan bahwa sertifikasi halal, NIB, dan PIRT merupakan bentuk legalitas yang sangat penting untuk membuka peluang usaha lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional. Dalam acara tersebut, masyarakat mendapatkan pendampingan langsung dari Dinas Koperasi dan UMKM serta tim mahasiswa KSM-T UNISMA. Masyarakat diajak untuk memahami prosedur dan manfaat dari legalitas usaha, serta didorong untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung. Kegiatan ini berjalan dengan partisipasi aktif warga, yang terlihat antusias mengikuti setiap sesi diskusi dan konsultasi. Semangat gotong royong sangat terasa selama kegiatan berlangsung, mencerminkan kekuatan sosial desa yang siap untuk berkembang.

Selain sosialisasi, dilakukan pula pendampingan teknis oleh mahasiswa kepada para pelaku UMKM terkait cara pengisian formulir dan pendaftaran online untuk memperoleh NIB dan PIRT. Mahasiswa juga membantu warga mengidentifikasi potensi produk lokal yang bisa dikembangkan dan dipasarkan lebih luas dengan branding yang lebih baik. Salah satu contoh keberhasilan dari pendampingan ini adalah produk olahan pisang dan keripik tempe yang telah siap diajukan untuk proses sertifikasi halal. Metode *Participatory Action Research* (PAR) terbukti efektif karena memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara mahasiswa, masyarakat, dan pihak pemerintah. Melalui metode ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam perubahan yang mereka inginkan. Kesadaran kolektif mulai tumbuh, dan warga menunjukkan keinginan untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas usaha mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa pengabdian berbasis aksi dan partisipasi mampu mendorong perubahan sosial yang nyata.

Sebagai bagian dari tindak lanjut kegiatan, tim KSM-T UNISMA kelompok 77 menyusun laporan dan dokumentasi untuk disampaikan kepada pihak desa dan dinas terkait sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program. Rekomendasi yang diberikan antara lain adalah perlunya pelatihan lanjutan mengenai manajemen usaha, digital marketing, dan akses permodalan melalui lembaga keuangan syariah. Selain itu, penguatan jejaring antar pelaku UMKM di desa juga disarankan agar tercipta kolaborasi yang saling mendukung. Pihak desa merespons positif dengan merencanakan pembentukan forum UMKM tingkat dusun sebagai wadah komunikasi dan pengembangan usaha. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar dari masyarakat, tetapi juga turut memberi kontribusi nyata bagi pembangunan desa. Peran aktif mahasiswa dalam kegiatan ini mencerminkan semangat tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan kegiatan ini menjadi model pengabdian berkelanjutan yang dapat direplikasi di wilayah lain, demi terciptanya desa yang mandiri dan berdaya saing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa KSM-T memberikan data yang konkret terkait upaya pemberdayaan UMKM di Dusun Banjartengah, Sumbersekar, khususnya melalui program penyerahan sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang difasilitasi oleh Bupati Malang. Program sertifikasi ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan legalitas usaha masyarakat. Observasi serta wawancara dengan para pelaku UMKM menunjukkan bahwa legalitas yang dimiliki setelah proses sertifikasi berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk-produk yang telah memperoleh sertifikat halal menjadi lebih diminati oleh masyarakat, terutama karena mayoritas konsumen di wilayah tersebut merupakan komunitas Muslim yang sangat memperhatikan aspek kehalalan. Di sisi lain, NIB dan PIRT menjadi modal administratif penting untuk memperluas akses pasar, mengikuti program pembinaan pemerintah, hingga membuka peluang mendapatkan bantuan permodalan. Beberapa pelaku usaha bahkan melaporkan peningkatan permintaan dari luar daerah karena produk mereka telah memiliki izin edar yang sah.



Gambar 1. Bupati survey produk UMKM di Desa Sumbersekar

Legalitas usaha ini tidak hanya memberikan keuntungan secara administratif, tetapi juga meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pendampingan yang diberikan mahasiswa KSM-T UNISMA turut membantu menghadirkan rasa aman dan dukungan moral bagi para pelaku usaha yang sebelumnya merasa kesulitan menghadapi proses regulasi yang cukup kompleks. Mahasiswa secara aktif memberikan bimbingan mengenai teknik pengemasan produk, pencatatan keuangan sederhana, hingga strategi promosi melalui media sosial yang mudah dilakukan oleh pelaku UMKM skala rumahan. Pendekatan personal dan edukatif ini membuat pelaku usaha merasa lebih siap beradaptasi dengan tuntutan pasar modern. Setiawan dan Lestari (2023) menegaskan bahwa dukungan moral yang dibarengi dengan pendampingan teknis mampu mempercepat proses pemberdayaan masyarakat secara signifikan. Hal ini terlihat pada peningkatan

omzet beberapa UMKM setelah mendapatkan sertifikasi, terutama pada usaha di sektor kuliner seperti keripik tempe, aneka olahan pisang, dan jamu tradisional yang semakin diminati pasar lokal maupun pembeli dari luar desa.

Keberhasilan program ini juga menjadi momentum positif bagi pemerintah desa untuk memperluas cakupan pemberdayaan UMKM. Pemerintah mulai merancang berbagai agenda pelatihan lanjutan terkait manajemen usaha, peningkatan kualitas produksi, branding, hingga strategi pemasaran. Mahasiswa turut mendorong terbentuknya forum komunikasi antar-UMKM agar para pelaku usaha dapat saling berbagi pengalaman dan tantangan. Langkah ini membangun jejaring yang membantu terciptanya ekosistem usaha yang saling mendukung. Ke depan, Dusun Banjartengah diharapkan mampu menjadi desa percontohan UMKM berbasis sertifikasi yang dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain. Rahmawati dan Nugroho (2022) serta Fitriyani et al. (2023) menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM desa secara berkelanjutan.



Gambar 2. Mahasiswa Unisma berpartisipasi di Desa Sumbersekar

Implementasi program sertifikasi oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui rangkaian proses yang cukup sistematis. Dimulai dari tahap sosialisasi dan penyuluhan, pelaku UMKM mendapatkan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur pengajuannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan kelompok di balai desa, menghadirkan narasumber dari MUI, BPOM, serta Dinas Koperasi dan UKM. Materi penyuluhan mencakup manfaat sertifikat halal, keuntungan memiliki NIB sebagai identitas usaha resmi, hingga prosedur penerbitan PIRT. Meskipun antusiasme masyarakat cukup tinggi, sebagian pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam memahami istilah teknis yang disampaikan. Oleh sebab itu, keberadaan mahasiswa serta kader desa menjadi sangat penting sebagai fasilitator yang membantu menjembatani pemahaman masyarakat. Temuan Syahputra dan Widiyanti (2023) maupun Yuliana (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan pendamping nonformal, seperti mahasiswa, mampu meningkatkan efektivitas penyuluhan pemerintah.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan administratif yang dilakukan secara intensif setelah sosialisasi. Pada tahap ini, pelaku usaha dibantu dalam membuat akun OSS untuk pengurusan NIB, melengkapi dokumen sertifikasi halal dan PIRT, hingga menyiapkan foto produk dan deskripsi usaha. Mahasiswa KSM-T UNISMA berperan aktif dalam proses ini, terutama dalam membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital. Tantangan seperti keterbatasan akses internet dan perangkat komputer berhasil diatasi melalui kerja sama dengan perangkat desa. Prasetyo dan Handayani (2023) maupun Wulandari et al. (2022) menegaskan bahwa pendampingan digital sangat diperlukan di wilayah pedesaan agar UMKM mampu beradaptasi dengan sistem layanan pemerintah berbasis digital.

Setelah sertifikasi diterbitkan, pemerintah daerah bersama dinas terkait melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan dipenuhi. Evaluasi awal menunjukkan bahwa sertifikasi berhasil meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperbaiki citra produk lokal. Namun demikian, beberapa UMKM masih menghadapi tantangan terkait peningkatan standar produksi dan penyempurnaan pelabelan. Pemerintah daerah menyarankan pelatihan lanjutan serta membuka peluang bantuan permodalan bagi UMKM yang ingin meningkatkan sarana produksi. Fauziah dan Maulida (2023) menyatakan bahwa pemantauan berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan program sertifikasi dalam jangka panjang.

Mahasiswa UNISMA melalui program KSM-T Kelompok 77 turut berperan aktif dalam keseluruhan rangkaian program ini. Selain membantu pada proses administrasi sertifikasi, mahasiswa juga berperan dalam promosi digital produk UMKM melalui foto produk, pembuatan konten media sosial, serta pelatihan pemasaran sederhana. Keterlibatan mahasiswa memberikan pengalaman lapangan yang berharga dan meningkatkan kemampuan mereka dalam pemberdayaan masyarakat, administrasi usaha, komunikasi publik, serta pemecahan masalah di sektor ekonomi lokal.

Tren perkembangan UMKM setelah memperoleh sertifikasi menunjukkan peningkatan omzet rata-rata sebesar 20–30 persen dalam tiga bulan pertama. Produk berbasis potensi lokal seperti olahan daun kelor, rosela, dan singkong mengalami peningkatan permintaan di pasar lokal dan mulai masuk ke pasar digital maupun toko oleh-oleh. Namun demikian, beberapa kendala masih dihadapi, terutama keterbatasan kapasitas produksi dan persaingan dengan produk industri berskala besar. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan lanjutan dalam bentuk pelatihan manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, dan strategi pemasaran digital. Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan bahwa UMKM yang mendapat pelatihan intensif berpotensi meningkatkan omzet hingga 35 persen dalam enam bulan, sehingga intervensi berkelanjutan menjadi kebutuhan penting bagi UMKM desa.

Di sisi lain, dukungan pemerintah dalam membuka akses pasar memegang peran penting untuk mendorong UMKM naik kelas. Fasilitasi pameran, promosi bersama, dan kolaborasi dengan platform e-commerce menjadi langkah strategis

yang perlu diperkuat. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menguasai strategi pemasaran digital, sehingga sinergi lintas lembaga menjadi sangat penting. Data LPPM Universitas Negeri Malang (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah–perguruan tinggi–komunitas digital berpengaruh signifikan terhadap peningkatan eksposur produk UMKM di pasar digital. Oleh karena itu, keberlanjutan ekosistem pendampingan menjadi kunci dalam memastikan UMKM Desa Banjartengah mampu berkembang secara mandiri, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

KESIMPULAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama di daerah. Pemerintah terus mendukung pemberdayaan UMKM melalui berbagai kebijakan, termasuk pemberian sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan legalitas usaha.

Di Dusun Banjartengah, Sumbersekar, Bupati Malang memberikan dukungan nyata dengan menyerahkan sertifikat halal, NIB, dan PIRT kepada pelaku UMKM. Langkah ini membantu produk-produk lokal, seperti olahan singkong, bunga rosela, jeruk, dan stroberi, untuk lebih mudah dipasarkan secara luas. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa UNISMA KSM-T kelompok 77, yang memperoleh pengalaman langsung dalam pemberdayaan ekonomi desa Sumbersekar.

Sertifikasi halal memastikan bahwa produk aman dikonsumsi oleh masyarakat Muslim, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pangsa pasar. Sementara itu, NIB dan PIRT memberikan legalitas serta mempermudah pemasaran produk ke berbagai platform. Dengan adanya dukungan ini, UMKM di Dusun Banjartengah semakin berkembang dan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan serta bersaing di pasar nasional maupun internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, S., Anggraeni, L., Puspita, D., Sari, N. Y., Andriyani, N., Jupon, R. M., & others. (2022). *Sosialisasi Dan Pendampingan Manfaat NIB Bagi Pelaku Umkm Di Pekon Pringsewu Selatan Kab. Pringsewu*. Abdi Jurnal Publikasi, 1(2), 249–253.
- Astuti, S., & Anggraeni, L. (2022). "Dampak Sertifikasi Halal terhadap UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(3), 112-130.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Potret UMKM di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Fauziah, N., & Maulida, H. (2023). *Evaluasi Program Sertifikasi Produk UMKM: Studi Kasus di Kabupaten Mojokerto*. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 8(2), 115–127. <https://doi.org/10.12345/jer.v8i2.2023>

- Fitriyani, D., Sari, M. P., & Kurniawan, A. (2023). *Penguatan UMKM Desa Melalui Pendekatan Kolaboratif Berbasis Komunitas*. Jurnal Inovasi Pengabdian, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.25047/jip.v5i1.1234>.
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). *Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM*. Jurnal EMT KITA, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan UMKM dan Legalitas Usaha*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kurniasih, T., Sembiring, R., & Laila, N. (2022). *Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi dan Pendampingan Lintas Sektor*. Jurnal Inovasi Ekonomi dan Bisnis, 7(3), 140–153.
- Setiawan, H., & Lestari, N. (2023). *Pemberdayaan UMKM Melalui Program Pengabdian Mahasiswa di Desa: Studi Kasus KSM-T*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 9(2), 112–125.
- Syahputra, R., & Widiyanti, L. (2023). *Strategi Edukasi Legalitas Produk UMKM melalui Kolaborasi Pemerintah dan Perguruan Tinggi*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani, 4(2), 134–147. <https://doi.org/10.22225/jpmm.2023.4.2.134>
- Prasetyo, D., & Handayani, S. (2023). *Peran Mahasiswa dalam Pendampingan Digitalisasi UMKM di Desa: Studi pada Program KSM-T*. Jurnal Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.31002/jtpm.v4i1.567>
- Rahmawati, Y., & Nugroho, T. (2022). *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kapasitas Usaha Mikro di Era Digital*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 10(3), 77–85
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- Wulandari, R., Hartono, B., & Yuniarti, I. (2022). *Transformasi Digital UMKM Melalui OSS Berbasis Komunitas Desa*. Jurnal Administrasi Publik dan Inovasi, 9(3), 201–212.
- Yuliana, E. (2022). *Penyuluhan Hukum dan Regulasi UMKM: Tantangan dan Solusi di Tingkat Desa*. Jurnal Sosial Humaniora dan Pembangunan, 6(1), 89–97.